



“Dan sesungguhnya Kami telah membinasakan negeri-negeri di sekitarmu dan Kami telah mendatangkan tanda-tanda kebesaran Kami berulang-ulang supaya mereka kembali (bertaubat). (QS Al Ahsaaf ayat 27)”

Jadwal Shalat

SUBUH	05:01	WIB
ZUHUR	12:22	WIB
ASHAR	15:37	WIB
MAGHRIB	18:25	WIB
ISYA	19:34	WIB

IndiHome FIBER **Telkom Indonesia**

Viral



AHMAD Krismon bersama Ayahandanya, saat mengikuti prosesi wisuda secara daring dari kawasan perbukitan di kampung halamannya, Sungai Guntuang, Nagari Pasia Laweh, Kabupaten Agam, Kamis (27/8). IST

Mendaki Bukit Demi Wisuda Daring

PADANG, HALUAN — Keterbatasan sinyal internet di Sungai Guntuang, Nagari Pasia Laweh, Kabupaten Agam, tak membuat Ahmad Krismon patah arang untuk tetap mengikuti prosesi wisuda yang berlangsung secara daring, Kamis (27/8) kemarin. Lulusan IAIN Bukittinggi itu melahap tanjakan sejauh 2 kilometer menuju puncak bukit, agar sinyal di gawainya memadai untuk mendukung kesaklaran prosesi “pindah jambul”.

Bukan saja jarak tempuh 2 kilometer dengan sepeda motor yang harus ia tunaikan. Selepas mengemudi kendaraan, Krismon harus berjalan kaki sejauh 200 meter, menghadapi tanjakan perbukitan agar sinyal di gawai semakin kuat. Perjuangannya pun mendapatkan respons positif dari warganet.

“Hari ini wisuda. Wisuda dilakukan secara daring. Saya terpaksa harus naik ke atas bukit untuk mendapatkan sinyal agar bisa ikut prosesi wisuda,” kata Krismon kepada wartawan.

Menurut wisudawan jurusan D3 Perbankan Syariah itu, menjadi seorang lulusan perguruan tinggi dan diwisuda, merupakan sebuah kebanggaan besar yang tak terkira. Oleh karena itu, Krismon turut serta membawa ayah, ibu, beserta keluarganya yang lain untuk turut mendaki bukit. Menyaksikan prosesi wisudanya.

>> MENDAKI hal 07



OLAH RASA — Seniman batik tengah unjuk kebolehan di tengah pameran Realitas Sosial-New Life di Galeri Taman Budaya Sumbar, Jumat (28/8). Di tengah pandemi Covid-19, banyak seniman kehilangan peluang memasarkan karya, tetapi tetap berusaha menghasilkan karya. IRHAM KURNIAWAN

SUMBAR DI ANTARA PANDEMI DAN POTENSI MEGATHRUST

Kesiapsiagaangan Ganda Sikapi Bencana

POTENSI gempa besar di Segmen Siberut Mentawai tetap bisa keluar tanpa harus dipengaruhi oleh aktivitas tektonik di sekitarnya. Ibarat buah, ia sudah matang.

BADRUL MUSTAFA KEMAL
Pengamat Gempa/Akademisi Unand

PADANG, HALUAN — Meski disibukkan dengan upaya penanganan bencana nonalam Covid-19, Pemerintah dan masyarakat di Sumbar tidak boleh lengah dan hasur selalu waspada atas ancaman bencana alam seperti gempa bumi yang “datang tanpa permisi”. Terle-

bih, perairan Sumbar menyimpan energi besar di zona Mentawai Megathrust.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Padang Panjang mencatat, selama Agustus 2020 telah terjadi 12 kali kejadian gempa bumi. Kepala Seksi

Data dan Informasi BMKG Padang Panjang Mamuri, mengatakan, masyarakat memang harus berbagi fokus dalam penerapan adaptasi kebiasaan baru, serta tetap waspada terhadap potensi gempa.

>> KESIAPSIAGAAN hal 07



TIM riset uji klinis Covid-19 Universitas Padjadjaran melakukan simulasi penyuntikan vaksin Covid-19 di hadapan para wartawan di Rumah Sakit Pendidikan Unpad, Jalan Eijkman No. 38, Bandung, beberapa waktu lalu. Sejumlah relawan telah mendaftar untuk menjadi penerima vaksin tersebut. IST/UNPAD

PRODUKSI VAKSIN COVID-19

MUI Tunggu Produsen Urus Sertifikasi Halal

JAKARTA, HALUAN — Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin berharap agar proses sertifikasi halal untuk vaksin Covid-19 segera dimulai meskipun masih dalam tahap produksi. Di sisi

lain, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengaku belum ada produsen vaksin Covid-19 yang mengajukan pendaftaran produk untuk mendapatkan pengujian serta pengakuan halal.

Dalam telekonferensinya bersama Direktur Utama PT Bio Farma, Wapres Ma'ruf Amin mengatakan,

>> MUI hal 07

PENDAFTARAN BELUM DIBUKA

Bawaslu Catat 1.098 Pelanggaran Pilkada

JAKARTA, HALUAN — Meski Pilkada serentak baru akan memasuki tahap pendaftaran calon pada 4 September, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI justru telah mencatat 1.098 dugaan pelanggaran hingga 12 Agustus 2020. Di Sumbar, Pilkada Agam dan Sijunjung termasuk dua dari sepuluh daerah pelaksana dengan tingkat kerawanan pelanggaran tertinggi secara nasional. Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo dalam keterangan tertulisnya di laman resmi Bawaslu RI, Jumat (27/8) menyebutkan, dari 1.098 kasus dugaan pelanggaran Pilkada 2020 sejauh ini, terdiri dari 904 kasus yang telah naik dan 194 dalam bentuk laporan (dugaan pelanggaran).

Dugaan pelanggaran itu, kata Ratna Dewi, terjadi hanya selama tahapan verifikasi faktual (verfak) dukungan calon kepala daerah



SURYA EFITRIMEN



RATNA DEWI P



ELVYS

perseorangan, serta tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) untuk penyusunan daftar pemilih. Masih banyak tahapan pilkada yang belum dilaksanakan, sehingga ke depan potensi dugaan pelanggaran masih mungkin terjadi.

“Kita belum sampai pada tahapan pencalonan, tahapan kampanye, penghitungan. Nah, ini harus menjadi

kewaspadaan kita,” ujar Ratna. Ratna menerangkan, dari total 1.098 kasus tersebut, terdiri dari 242 kasus dugaan pelanggaran administrasi sebanyak, yang mayoritas disebabkan karena penyelenggara mengumumkan seleksi penyelenggara *ad hoc* tidak sesuai ketentuan.

>> BAWASLU hal 07

“Nongkrong” Sepi, Pertumbuhan Ekonomi Terkoreksi

MENTERI Keuangan Sri Mulyani menyebutkan bahwa kebiasaan “nongkrong” di pusat jajanan kuliner yang menyusut di tengah pandemi, ikut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pernyataan itu setali dengan pengakuan para pelaku usaha kuliner di Sumbar, yang merasakan penurunan tajam omzet sejak pandemi berlangsung.

Oleh: **JULI ISHAQ PUTRA**

Rega Dwi Putra, pengelola Bengras Kopi dan RR Food di pertigaan Kantor DPRD Sumbar menyebutkan, usahanya bahkan sempat tutup saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

diterapkan pemerintah daerah (Pemda). Belum lagi, mahasiswa sebagai pelanggan utama tak banyak lagi berkunjung sejak pembelajaran daring diterapkan kampus.

“Karena posisi di dekat beberapa kampus, pelanggan kami banyak dari UNP dan UBH. Sejak Covid-19, jelas jual beli menurun

jauh. Sekarang juga mahasiswa masih di kampung masing-masing karena kuliah daring. Kita tetap buka karena sudah tutup cukup lama saat PSBB,” kata Rega.

Hal senada diucapkan Randi, selaku Barista (penyeduh kopi) di kafe tersebut. Randi mengakui, sejak pandemi memang tak banyak pengunjung yang nongkrong dalam jumlah ramai. Pembatasan jarak fisik diyakininya jadi alasan utama. Namun, sejak era *new normal* atau adaptasi kebiasaan baru berlangsung, beberapa pelanggan sudah mulai nongkrong di kafe tersebut.

“Mungkin karena kebijakan jaga jarak, ya. Ya, wajar saja semua orang cemas akan Covid-19 ini.

Kami sebagai pelaku usaha kuliner juga tidak mungkin tutup terus. Jalan keluarnya ya tetap buka dengan ikut menerapkan protokol kesehatan, seperti menyediakan sarana cuci tangan dan menyemprot disinfektan,” kata Randi.

Turunan serupa ikut dikeluhkan Aji Akbar, pemilik Morza Coffee-shop di Kota Solok.

>> “NONGKRONG” hal 07

BENGRAS Kopi dan RR Food di pertigaan Kantor DPRD Sumbar, Kamis (27/8). Pelaku usaha kuliner mengakui terjadi penurunan tajam omzet di tengah pandemi Covid-19 yang belum berakhir. JULI ISHAQ



Pemutihan Denda PKB Dimulai 1 September

PADANG, HALUAN — Pemprov Sumbar akan memulai program penghapusan sanksi administrasi atau pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) pada 1 September hingga 31 Oktober 2020 mendatang. Wajib pajak diminta untuk segera membayar kewajiban selagi diberikan keringanan beban.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakendak) Sumbar Zaenuddin, Jumat (28/8) dalam keterangan tertulisnya, sebagaimana dilansir oleh Dinas Kominfo Sumbar. Zaenuddin menyebutkan, program tersebut juga sebetulnya relaksasi yang diberikan bagi masyarakat terdampak Covid-19.

“Mulai tanggal 1 September besok, masyarakat sudah bisa mendatangi kantor Samsat di

setiap daerah di Sumbar. Mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan oleh pengguna wajib pajak,” kata Zaenuddin dalam keterangan tersebut.

Zaenuddin menjelaskan, pemutihan pajak sendiri terdiri atas empat jenis, yaitu penghapusan denda keterlambatan pajak kendaraan bermotor, penghapusan denda biaya balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), penghapusan denda asuransi jasa raharja (SWDKLLJ), dan pembebasan biaya balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) bernomor polisi BA dan nomor polisi luar Sumbar atau non-BA.

“Tentunya program pemutihan pajak kendaraan ini sudah sangat dinantikan masyarakat Sumbar. Bagi yang belum sempat membayar pajak kendaraan akibat

pandemi ini, segera bayarkan saat adanya kesempatan pemutihan ini,” ucapnya lagi.

Sementara itu, Kepala Samsat Padang Hidayat mengatakan, bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 dan belum sempat bayar pajak, diminta untuk datang langsung ke kantor Samsat, dengan cukup membayar pokok pajak. Namun, saat pembayaran ke kantor ia berharap agar masyarakat tetap memperhatikan protokol kesehatan.

“Samsat sempat tutup sementara karena kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Sumbar beberapa waktu lalu. Jadi, diharapkan masyarakat patuh membayar pajak dengan adanya program pemutihan pajak tersebut,” sebut Hidayat. (h/win)

Mendaki

Krismon berharap, agar daerahnya segera mendapatkan akses jaringan internet yang lebih luas, sehingga untuk keperluan penting terkait internet, warga tak meski naik bukit untuk mendapatkan sinyal yang bagus. “Saya tentu berharap akses internet lebih diperluas di sini. Tidak perlu naik bukit lagi,” kata Krismon, dilansir oleh *kompas.com*.

Melihat perjuangan Krismon yang harus naik ke atas bukit agar dapat mengikuti proses wisata,

warganet beramai-ramai memberikan simpati kepadanya. Akun Suci Wahyuni Putri Tunggal tampak mengucapkan selamat dan salut atas perjuangan Krismon.

“Selamat, Dek. Tetap semangat, meski di tengah keterbatasan. Semoga ilmu yang telah diperoleh dapat bermanfaat untuk diri sendiri dan keluarga. Semoga kelak dapat lebih membahagiakan kedua orang tua,” tulisnya di kolom komentar *facebook*

Dari Halaman. 1

yang memosting berita tersebut. Senada dengan komentara Suci, akun San Francisco 1995 juga mengutarakan hal serupa. Ia mengaku salut dan bangga atas perjuangan yang dilakukan Krismon. “Sangat membanggakan. Apa adanya. Tidak malu dan gengsi dengan keterbatasan, meski harus naik dulu ke atas bukit. Salut dengan mahasiswa yang seperti ini. Tidak manja, calon orang sukses. Sekali lagi, selamat,” pungkasnya. (h/mg-rga)

“Nongkrong”

Ia mengaku sejak pandemi Covid-19, kedai kopinya kadang buka dan kadang tutup karena sepiunya pelanggan yang datang. Ia berharap, agar pandemi segera berlalu sehingga penjualan bisa normal kembali.

“Kadang sudah buka sehabian hanya jual satu atau dua *cup* (gelas.red). Apalagi sejak Covid-19 makin meningkat kasusnya di Kota Solok. Kita sebagai pengusaha pun ikut was-was. Was-was tidak jual beli, was-was juga terkena corona,” kata Aji.

telah menanjak sejak Juni, ia melihat aktivitas konsumsi seperti ‘nongkrong’ tetap masih rendah.

“Konsumsi menurun sangat tajam karena kalangan menengah bawah dalam situasi sangat rapuh. Kalangan menengah atas di rumah, tapi masih bisa kegiatan digital, beli *online* dan segala macam. Tapi tidak mensubstitusi yang biasanya, pergi beli kopi atau nongkrong di warung, itu tidak terjadi,” sebut Sri lewat telekonferensi, Jumat (28/8).

Dari Halaman. 1

pemerintah akan kian gencar menyalurkan stimulus seperti bantuan sosial (bansos), mau pun bantuan tunai langsung (BLT) kepada 40 persen masyarakat terbawah.

Tak hanya dari sisi konsumsi (permintaan), perangsang juga diberikan dari sisi produksi dengan menyalurkan kredit usaha baru serta stimulus untuk dunia usaha baik UMKM mau pun korporasi.

“Kadang sudah buka sehabian hanya jual satu atau dua *cup* (gelas.red). Apalagi sejak Covid-19 makin meningkat kasusnya di Kota Solok. Kita sebagai pengusaha pun ikut was-was. Was-was tidak jual beli, was-was juga terkena corona,” kata Aji.

Aji pun mengaku tak mau ambil risiko saat kasus Covid-19 sedang meningkat di kotanya. Dalam beberapa hari terakhir, ia mengaku Morza Coffeeshop tutup sementara hingga situasi agak membaik. “Risikonya besar sekali kalau tetap buka. Sebab kita tidak tahu pelanggan kita datang dari mana. Sementara tutup dulu. Lihat situasi,” katanya lagi.

Lebih lanjut, Bendahara Negara itu menyebutkan, data Google Mobility Indeks (GMI) sejak Juni telah menunjukkan pergerakan yang membaik. GMI Juni tercatat minus 12 dari normal, membaik dari perolehan Mei yaitu minus 24.

Namun, hal tersebut tak lantas menjamin masyarakat melakukan konsumsi atau berbelanja. Menurutnya, konsumsi masyarakat tak terjadi, ini terbukti dari capaian konsumsi pada kuartal II yang minus 5,51 persen.

Hal senada juga disampaikan Kepala Pusat Monitoring Bencana dan Observasi Bumi (*Center of Disaster Monitoring and Earth Observation*) Universitas Negeri

Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, salah satu faktor utama pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2020 mengalami koreksi 5,32 persen adalah rendahnya konsumsi masyarakat. Meski pusat perbelanjaan telah dibuka dan perjalanan tercatat

Pasalnya, masyarakat menengah ke bawah yang memiliki situasi keuangan rapuh tak dapat melakukan konsumsi. Sementara kalangan menengah ke atas meski masih berbelanja namun tak sekecang normal.

Oleh karena itu, ia menyebut

“Pemerintah memformulasikan kebijakan melihat 2 sisi, permintaan atau konsumsi terutama kelompok rapuh tapi juga memberi confidence (keyakinan) untuk kelompok menengah atas agar mereka bisa mulai melakukan aktivitas dan konsumsi,” jelas Ani, sapaan akrabnya.

Namun, itu saja tidak cukup untuk menopang pertumbuhan. Pasalnya, investasi selama pandemi anjlok, minus 8,6 persen selama pada kuartal II 2020. Maka, untuk mendorong pertumbuhan kuartal III dan IV tahun ini, pemerintah sejak Agustus telah mengakselerasi belanja lintas kementerian. Salah satunya, dengan melanjutkan pembangunan infrastruktur yang memungkinkannya. (h/*)

Konsumsi Menurun

Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, salah satu faktor utama pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2020 mengalami koreksi 5,32 persen adalah rendahnya konsumsi masyarakat. Meski pusat perbelanjaan telah dibuka dan perjalanan tercatat

Pasalnya, masyarakat menengah ke bawah yang memiliki situasi keuangan rapuh tak dapat melakukan konsumsi. Sementara kalangan menengah ke atas meski masih berbelanja namun tak sekecang normal.

Oleh karena itu, ia menyebut

Dari Halaman. 1

rintah sudah dapat menyuntikkan 30 juta dosis vaksin Covid-19 kepada 15 juta orang.

Ia optimistis vaksin Covid-19 hasil kerja sama dengan perusahaan China, Sinovac dapat rampung dan mulai digunakan sebanyak 20 juta vaksin pada akhir tahun. Sementara, kerja sama Kimia Farma dengan G42 di Uni Emirat Arab (UAE) akan menghasilkan 10 juta dosis pada Desember 2020.

MUI

bahwa sesuai peraturan perundangannya, semua produk di Indonesia wajib bersertifikat halal, termasuk produk farmasi. Dengan demikian, Ma’ruf berharap saat vaksin tersedia, bisa langsung beredar di masyarakat.

Ma’ruf menilai, sertifikasi halal vaksin diwajibkan demi memperoleh kepercayaan masyarakat. Terlebih penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, dan persoalan halal menjadi perhatian utama dalam mengonsumsi sesuatu.

“Saya kira proses sertifikasi halal (vaksin Covid-19) harus dimulai, jangan sampai pernah terjadi waktu vaksin MR, itu terlambat, vaksinnya sudah beredar, sertifikatnya (halal) belum. Jadi supaya sebelum nanti diproduksi, sertifikat itu sudah keluar, jangan sampai ada seperti itu,” kata Ma’ruf.

Selain itu, meski produksi vaksin Covid-19 diutamakan untuk dalam negeri, namun tidak menutup kemungkinan produksi vaksin akan diekspor ke negara-negara lain, termasuk negara berpenduduk mayoritas muslim. “Maka sertifikat halal itu sangat diperlukan,” katanya lagi.

Dari Halaman. 1

“Komitmen hari ini vaksin kumulatif dari dua kerja sama ini dapat 30 juta vaksin di tahun 2020, kalau satu orang butuh 2 dosis jadi 15 juta orang yang akan bisa divaksin akhir 2020, tentu kalau sesuai uji klinis berjalan baik,” katanya dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Kamis (27/8).

Erick menuturkan, bahwa pemerintah telah menerangkan tim khusus ke Saudi Arabia untuk meninjau langsung, ia juga memastikan bahwa Ketua Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) telah menyatakan bahwa uji klinis yang dilakukan G24 sinkron dengan kebutuhan dalam negeri.

“Saya kira proses sertifikasi halal (vaksin Covid-19) harus dimulai, jangan sampai pernah terjadi waktu vaksin MR, itu terlambat, vaksinnya sudah beredar, sertifikatnya (halal) belum. Jadi supaya sebelum nanti diproduksi, sertifikat itu sudah keluar, jangan sampai ada seperti itu,” kata Ma’ruf.

Selain itu, meski produksi vaksin Covid-19 diutamakan untuk dalam negeri, namun tidak menutup kemungkinan produksi vaksin akan diekspor ke negara-negara lain, termasuk negara berpenduduk mayoritas muslim. “Maka sertifikat halal itu sangat diperlukan,” katanya lagi.

“Komitmen hari ini vaksin kumulatif dari dua kerja sama ini dapat 30 juta vaksin di tahun 2020, kalau satu orang butuh 2 dosis jadi 15 juta orang yang akan bisa divaksin akhir 2020, tentu kalau sesuai uji klinis berjalan baik,” katanya dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Kamis (27/8).

Erick menuturkan, bahwa pemerintah telah menerangkan tim khusus ke Saudi Arabia untuk meninjau langsung, ia juga memastikan bahwa Ketua Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) telah menyatakan bahwa uji klinis yang dilakukan G24 sinkron dengan kebutuhan dalam negeri.

“Komitmen hari ini vaksin kumulatif dari dua kerja sama ini dapat 30 juta vaksin di tahun 2020, kalau satu orang butuh 2 dosis jadi 15 juta orang yang akan bisa divaksin akhir 2020, tentu kalau sesuai uji klinis berjalan baik,” katanya dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Kamis (27/8).

Erick menuturkan, bahwa pemerintah telah menerangkan tim khusus ke Saudi Arabia untuk meninjau langsung, ia juga memastikan bahwa Ketua Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) telah menyatakan bahwa uji klinis yang dilakukan G24 sinkron dengan kebutuhan dalam negeri.

“Saya kira proses sertifikasi halal (vaksin Covid-19) harus dimulai, jangan sampai pernah terjadi waktu vaksin MR, itu terlambat, vaksinnya sudah beredar, sertifikatnya (halal) belum. Jadi supaya sebelum nanti diproduksi, sertifikat itu sudah keluar, jangan sampai ada seperti itu,” kata Ma’ruf.

Selain itu, meski produksi vaksin Covid-19 diutamakan untuk dalam negeri, namun tidak menutup kemungkinan produksi vaksin akan diekspor ke negara-negara lain, termasuk negara berpenduduk mayoritas muslim. “Maka sertifikat halal itu sangat diperlukan,” katanya lagi.

“Komitmen hari ini vaksin kumulatif dari dua kerja sama ini dapat 30 juta vaksin di tahun 2020, kalau satu orang butuh 2 dosis jadi 15 juta orang yang akan bisa divaksin akhir 2020, tentu kalau sesuai uji klinis berjalan baik,” katanya dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Kamis (27/8).

Erick menuturkan, bahwa pemerintah telah menerangkan tim khusus ke Saudi Arabia untuk meninjau langsung, ia juga memastikan bahwa Ketua Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) telah menyatakan bahwa uji klinis yang dilakukan G24 sinkron dengan kebutuhan dalam negeri.

“Komitmen hari ini vaksin kumulatif dari dua kerja sama ini dapat 30 juta vaksin di tahun 2020, kalau satu orang butuh 2 dosis jadi 15 juta orang yang akan bisa divaksin akhir 2020, tentu kalau sesuai uji klinis berjalan baik,” katanya dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Kamis (27/8).

Erick menuturkan, bahwa pemerintah telah menerangkan tim khusus ke Saudi Arabia untuk meninjau langsung, ia juga memastikan bahwa Ketua Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) telah menyatakan bahwa uji klinis yang dilakukan G24 sinkron dengan kebutuhan dalam negeri.

“Saya kira proses sertifikasi halal (vaksin Covid-19) harus dimulai, jangan sampai pernah terjadi waktu vaksin MR, itu terlambat, vaksinnya sudah beredar, sertifikatnya (halal) belum. Jadi supaya sebelum nanti diproduksi, sertifikat itu sudah keluar, jangan sampai ada seperti itu,” kata Ma’ruf.

Selain itu, meski produksi vaksin Covid-19 diutamakan untuk dalam negeri, namun tidak menutup kemungkinan produksi vaksin akan diekspor ke negara-negara lain, termasuk negara berpenduduk mayoritas muslim. “Maka sertifikat halal itu sangat diperlukan,” katanya lagi.

“Komitmen hari ini vaksin kumulatif dari dua kerja sama ini dapat 30 juta vaksin di tahun 2020, kalau satu orang butuh 2 dosis jadi 15 juta orang yang akan bisa divaksin akhir 2020, tentu kalau sesuai uji klinis berjalan baik,” katanya dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Kamis (27/8).

Erick menuturkan, bahwa pemerintah telah menerangkan tim khusus ke Saudi Arabia untuk meninjau langsung, ia juga memastikan bahwa Ketua Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) telah menyatakan bahwa uji klinis yang dilakukan G24 sinkron dengan kebutuhan dalam negeri.

“Komitmen hari ini vaksin kumulatif dari dua kerja sama ini dapat 30 juta vaksin di tahun 2020, kalau satu orang butuh 2 dosis jadi 15 juta orang yang akan bisa divaksin akhir 2020, tentu kalau sesuai uji klinis berjalan baik,” katanya dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Kamis (27/8).

Erick menuturkan, bahwa pemerintah telah menerangkan tim khusus ke Saudi Arabia untuk meninjau langsung, ia juga memastikan bahwa Ketua Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) telah menyatakan bahwa uji klinis yang dilakukan G24 sinkron dengan kebutuhan dalam negeri.

“Saya kira proses sertifikasi halal (vaksin Covid-19) harus dimulai, jangan sampai pernah terjadi waktu vaksin MR, itu terlambat, vaksinnya sudah beredar, sertifikatnya (halal) belum. Jadi supaya sebelum nanti diproduksi, sertifikat itu sudah keluar, jangan sampai ada seperti itu,” kata Ma’ruf.

Selain itu, meski produksi vaksin Covid-19 diutamakan untuk dalam negeri, namun tidak menutup kemungkinan produksi vaksin akan diekspor ke negara-negara lain, termasuk negara berpenduduk mayoritas muslim. “Maka sertifikat halal itu sangat diperlukan,” katanya lagi.

“Komitmen hari ini vaksin kumulatif dari dua kerja sama ini dapat 30 juta vaksin di tahun 2020, kalau satu orang butuh 2 dosis jadi 15 juta orang yang akan bisa divaksin akhir 2020, tentu kalau sesuai uji klinis berjalan baik,” katanya dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Kamis (27/8).

Erick menuturkan, bahwa pemerintah telah menerangkan tim khusus ke Saudi Arabia untuk meninjau langsung, ia juga memastikan bahwa Ketua Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) telah menyatakan bahwa uji klinis yang dilakukan G24 sinkron dengan kebutuhan dalam negeri.

“Komitmen hari ini vaksin kumulatif dari dua kerja sama ini dapat 30 juta vaksin di tahun 2020, kalau satu orang butuh 2 dosis jadi 15 juta orang yang akan bisa divaksin akhir 2020, tentu kalau sesuai uji klinis berjalan baik,” katanya dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Kamis (27/8).

Erick menuturkan, bahwa pemerintah telah menerangkan tim khusus ke Saudi Arabia untuk meninjau langsung, ia juga memastikan bahwa Ketua Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) telah menyatakan bahwa uji klinis yang dilakukan G24 sinkron dengan kebutuhan dalam negeri.

“Saya kira proses sertifikasi halal (vaksin Covid-19) harus dimulai, jangan sampai pernah terjadi waktu vaksin MR, itu terlambat, vaksinnya sudah beredar, sertifikatnya (halal) belum. Jadi supaya sebelum nanti diproduksi, sertifikat itu sudah keluar, jangan sampai ada seperti itu,” kata Ma’ruf.

Selain itu, meski produksi vaksin Covid-19 diutamakan untuk dalam negeri, namun tidak menutup kemungkinan produksi vaksin akan diekspor ke negara-negara lain, termasuk negara berpenduduk mayoritas muslim. “Maka sertifikat halal itu sangat diperlukan,” katanya lagi.

“Komitmen hari ini vaksin kumulatif dari dua kerja sama ini dapat 30 juta vaksin di tahun 2020, kalau satu orang butuh 2 dosis jadi 15 juta orang yang akan bisa divaksin akhir 2020, tentu kalau sesuai uji klinis berjalan baik,” katanya dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Kamis (27/8).

Erick menuturkan, bahwa pemerintah telah menerangkan tim khusus ke Saudi Arabia untuk meninjau langsung, ia juga memastikan bahwa Ketua Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) telah menyatakan bahwa uji klinis yang dilakukan G24 sinkron dengan kebutuhan dalam negeri.

“Komitmen hari ini vaksin kumulatif dari dua kerja sama ini dapat 30 juta vaksin di tahun 2020, kalau satu orang butuh 2 dosis jadi 15 juta orang yang akan bisa divaksin akhir 2020, tentu kalau sesuai uji klinis berjalan baik,” katanya dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Kamis (27/8).

Erick menuturkan, bahwa pemerintah telah menerangkan tim khusus ke Saudi Arabia untuk meninjau langsung, ia juga memastikan bahwa Ketua Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) telah menyatakan bahwa uji klinis yang dilakukan G24 sinkron dengan kebutuhan dalam negeri.

Namun demikian, nantinya Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) akan tetap memastikan kehalalan vaksin tersebut. “Tapi memang

Namun demikian, nantinya Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) akan tetap memastikan kehalalan vaksin tersebut. “Tapi memang

Namun demikian, nantinya Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) akan tetap memastikan kehalalan vaksin tersebut. “Tapi memang

Kesiapsiagaan..... Dari Halaman. 1

“Seperti kita tahu daerah kita di Sumbar ini adalah daerah rawan gempa. Dan, faktanya, kejadian gempa bumi hingga saat ini belum dapat diprediksi waktunya. Bisa tiba kapan saja,” kata Mamuri kepada *Haluan*, Jumat (28/8).

Mamuri menyebutkan, saat ini sesar Mentawai masih terus aktif melepaskan energi. Keberadaan wilayah Sumbar di zona Mentawai Megathrust serta di zona sesar Sumatra, menuntut masyarakat Sumbar untuk tetap tenang sembari terus waspada.

Padang (UNP) Pakhrur Razi. Kepada *Haluan* ia menyebutkan, dalam dua tahun terakhir Sesar Sumatera dan Sesar Mentawai memang merupakan sesar paling aktif melepaskan energi ke-gempaan.

“Dari Sesar Mentawai sudah beberapa kali terjadi. Sementara di Sesar Sumatera jika dibandingkan intensitasnya dengan Sesar Mentawai, memang mengalami penurunan. Gempa-gempa kecil yang terjadi belakangan juga dapat mereduksi dari akumulasi kekuatan gempa megathrust,” kata Pakhrur Razi, Jumat (28/8) kepada *Haluan*.

ucap Pakhrur lagi.

Begitu juga dengan kesiapan dari anggaran penanggulangan bencana. Menurut Pakhrur, pemerintah daerah mesti tanggap terhadap anggaran, terlebih di tengah Pandemi Covid-19 di mana pemerintah tentu mengutamakan hampir seluruh anggaran untuk penanganan pandemi.

“Sumbar berada di zona subduksi megathrust, sesar mentawai, dan sesar Sumatera. Tentu harus ada anggaran jika sewaktu-waktu bencana alam besar terjadi. Pemerintah harus memberikan informasi yang jelas. Memastikan kesiapan alat-alat berat untuk evakuasi, serta lain sebagainya,” katanya menutup.

Di sisi lain, Pengamat Gempa dan Akademisi Universitas Andalas (Unand) Badrul Mustafa Kemal mengatakan, bahwa potensi gempa besar di Segmen Siberut Mentawai tetap bisa keluar tanpa harus dipengaruhinya oleh aktivitas tektonik di sekitarnya. “Ibarat buah, ia sudah matang,” kata Badrul kepada *Haluan*.

Badrul menekankan, bahwa tetap ada dua kemungkinan yang akan terjadi terkait energi besar Mentawai Megathrust, yaitu tidak terjadi sama sekali, dan kemungkinan terjadi dengan dampak buruk yang sangat massif. “Karena kita tidak tahu pasti, maka kesiapsiagaan perlu diterapkan dari waktu ke waktu,” ucap Badrul.

Menimbang kondisi dan potensi bencana ke depan, kata Pakhrur, pemerintah daerah mesti mempersiapkan *roadmap* sebelum dan sesudah bencana terjadi, seperti tempat mengungsi, kelengkapan alat-alat evakuasi, serta alarm peringatan dini bencana yang lebih baik.

“Sekarang baru ada *shelter* atau tempat evakuasi sementara (TES) masyarakat yang tinggal di tepi pantai. Sementara tempat-tempat evakuasi bagi daerah di daratan belum disiapkan. Kemudian perlu juga diperhatikan, bagaimana koordinasi pemerintah dengan BMKG dan BNPB. Mesti ada *roadmap* yang jelas,” ucapnya.

“Sumbar berada di zona subduksi megathrust, sesar mentawai, dan sesar Sumatera. Tentu harus ada anggaran jika sewaktu-waktu bencana alam besar terjadi. Pemerintah harus memberikan informasi yang jelas. Memastikan kesiapan alat-alat berat untuk evakuasi, serta lain sebagainya,” katanya menutup.

Badrul mengimbau masyarakat untuk membangun kesadaran akan kesiapsiagaan ganda, mengingat kondisi hari ini di mana wabah pandemi Covid-19 masih terus berlangsung. “Siap siaga terhadap Covid-19 dan siap siaga terhadap potensi gempa besar. Kesiapsiagaan ganda,” tuturnya.

Hal senada juga disampaikan Kepala Pusat Monitoring Bencana dan Observasi Bumi (*Center of Disaster Monitoring and Earth Observation*) Universitas Negeri

Menimbang kondisi dan potensi bencana ke depan, kata Pakhrur, pemerintah daerah mesti mempersiapkan *roadmap* sebelum dan sesudah bencana terjadi, seperti tempat mengungsi, kelengkapan alat-alat evakuasi, serta alarm peringatan dini bencana yang lebih baik.

“Sekarang baru ada *shelter* atau tempat evakuasi sementara (TES) masyarakat yang tinggal di tepi pantai. Sementara tempat-tempat evakuasi bagi daerah di daratan belum disiapkan. Kemudian perlu juga diperhatikan, bagaimana koordinasi pemerintah dengan BMKG dan BNPB. Mesti ada *roadmap* yang jelas,” ucapnya.

Menimbang kondisi dan potensi bencana ke depan, kata Pakhrur, pemerintah daerah mesti mempersiapkan *roadmap* sebelum dan sesudah bencana terjadi, seperti tempat mengungsi, kelengkapan alat-alat evakuasi, serta alarm peringatan dini bencana yang lebih baik.

“Sekarang baru ada *shelter* atau tempat evakuasi sementara (TES) masyarakat yang tinggal di tepi pantai. Sementara tempat-tempat evakuasi bagi daerah di daratan belum disiapkan. Kemudian perlu juga diperhatikan, bagaimana koordinasi pemerintah dengan BMKG dan BNPB. Mesti ada *roadmap* yang jelas,” ucapnya.

Badrul mengimbau masyarakat untuk membangun kesadaran akan kesiapsiagaan ganda, mengingat kondisi hari ini di mana wabah pandemi Covid-19 masih terus berlangsung. “Siap siaga terhadap Covid-19 dan siap siaga terhadap potensi gempa besar. Kesiapsiagaan ganda,” tuturnya.

Hal senada juga disampaikan Kepala Pusat Monitoring Bencana dan Observasi Bumi (*Center of Disaster Monitoring and Earth Observation*) Universitas Negeri

Menimbang kondisi dan potensi bencana ke depan, kata Pakhrur, pemerintah daerah mesti mempersiapkan *roadmap* sebelum dan sesudah bencana terjadi, seperti tempat mengungsi, kelengkapan alat-alat evakuasi, serta alarm peringatan dini bencana yang lebih baik.

“Sekarang baru ada *shelter* atau tempat evakuasi sementara (TES) masyarakat yang tinggal di tepi pantai. Sementara tempat-tempat evakuasi bagi daerah di daratan belum disiapkan. Kemudian perlu juga diperhatikan, bagaimana koordinasi pemerintah dengan BMKG dan BNPB. Mesti ada *roadmap* yang jelas,” ucapnya.

Menimbang kondisi dan potensi bencana ke depan, kata Pakhrur, pemerintah daerah mesti mempersiapkan *roadmap* sebelum dan sesudah bencana terjadi, seperti tempat mengungsi, kelengkapan alat-alat evakuasi, serta alarm peringatan dini bencana yang lebih baik.

“Sekarang baru ada *shelter* atau tempat evakuasi sementara (TES) masyarakat yang tinggal di tepi pantai. Sementara tempat-tempat evakuasi bagi daerah di daratan belum disiapkan. Kemudian perlu juga diperhatikan, bagaimana koordinasi pemerintah dengan BMKG dan BNPB. Mesti ada *roadmap* yang jelas,” ucapnya.

Hal senada juga disampaikan Kepala Pusat Monitoring Bencana dan Observasi Bumi (*Center of Disaster Monitoring and Earth Observation*) Universitas Negeri

Menimbang kondisi dan potensi bencana ke depan, kata Pakhrur, pemerintah daerah mesti mempersiapkan *roadmap* sebelum dan sesudah bencana terjadi, seperti tempat mengungsi, kelengkapan alat-alat evakuasi, serta alarm peringatan dini bencana yang lebih baik.

“Sekarang baru ada *shelter* atau tempat evakuasi sementara (TES) masyarakat yang tinggal di tepi pantai. Sementara tempat-tempat evakuasi bagi daerah di daratan belum disiapkan. Kemudian perlu juga diperhatikan, bagaimana koordinasi pemerintah dengan BMKG dan BNPB. Mesti ada *roadmap* yang jelas,” ucapnya.

Menimbang kondisi dan potensi bencana ke depan, kata Pakhrur, pemerintah daerah mesti mempersiapkan *roadmap* sebelum dan sesudah bencana terjadi, seperti tempat mengungsi, kelengkapan alat-alat evakuasi, serta alarm peringatan dini bencana yang lebih baik.

“Sekarang baru ada *shelter* atau tempat evakuasi sementara (TES) masyarakat yang tinggal di tepi pantai. Sementara tempat-tempat evakuasi bagi daerah di daratan belum disiapkan. Kemudian perlu juga diperhatikan, bagaimana koordinasi pemerintah dengan BMKG dan BNPB. Mesti ada *roadmap* yang jelas,” ucapnya.

Hal senada juga disampaikan Kepala Pusat Monitoring Bencana dan Observasi Bumi (*Center of Disaster Monitoring and Earth Observation*) Universitas Negeri

Menimbang kondisi dan potensi bencana ke depan, kata Pakhrur, pemerintah daerah mesti mempersiapkan *roadmap* sebelum dan sesudah bencana terjadi, seperti tempat mengungsi, kelengkapan alat-alat evakuasi, serta alarm peringatan dini bencana yang lebih baik.

“Sekarang baru ada *shelter* atau tempat evakuasi sementara (TES) masyarakat yang tinggal di tepi pantai. Sementara tempat-tempat evakuasi bagi daerah di daratan belum disiapkan. Kemudian perlu juga diperhatikan, bagaimana koordinasi pemerintah dengan BMKG dan BNPB. Mesti ada *roadmap* yang jelas,” ucapnya.

Menimbang kondisi dan potensi bencana ke depan, kata Pakhrur, pemerintah daerah mesti mempersiapkan *roadmap* sebelum dan sesudah bencana terjadi, seperti tempat mengungsi, kelengkapan alat-alat evakuasi, serta alarm peringatan dini bencana yang lebih baik.

“Sekarang baru ada *shelter* atau tempat evakuasi sementara (TES) masyarakat yang tinggal di tepi pantai. Sementara tempat-tempat evakuasi bagi daerah di daratan belum disiapkan. Kemudian perlu juga diperhatikan, bagaimana koordinasi pemerintah dengan BMKG dan BNPB. Mesti ada *roadmap* yang jelas,” ucapnya.

Bawaslu

Selain itu, ada 57 kasus dugaan pelanggaran kode etik dengan tren panitia pemungutan suara (PPS) atau panitia pemilihan kecamatan (PPK) memberi dukungan ke bakal calon.

Kemudian, sambung Ratna, terdapat 14 kasus dugaan pelanggaran tindak pidana dengan tren memalsukan dukungan pasangan calon perseorangan. “Pelanggaran hukum lainnya sebanyak 528 kasus dengan tren ASN memberikan dukungan politik melalui media sosial dan melakukan pendekatan mendaftarkan diri ke partai politik, dan 260 kasus bukan pelanggaran,” kata Ratna lagi.

Dari Halaman. 1

pendekatan atau mendaftarkan diri ke partai politik. “Sementara dua ASN lagi menghadiri silaturahmi dengan bakal calon yang dapat mengunggulkan bakal calon tersebut,” sebut Surya lagi.

Setelah ditindaklanjuti oleh Bawaslu, katanya lagi, 17 kasus di antaranya sudah diberikan sanksi sesuai rekomendasi dari Komisi ASN (KASN). Sanksi yang diberikan, berupa sanksi moral kepada satu orang ASN, sementara 16 lainnya diberikan sanksi disiplin kategori sedang.

“Sampai 10 Agustus, ditemukan 20 pelanggaran. Satu di tingkat provinsi, dua di Kabupaten Pasaman, 2 di Kota Solok, 3 di Sijunjung, dan 4 di Padang Pariaman. Lalu ada 2 kasus di Kabupaten Solok, 1 di Agam, 1 di Limapuluh Kota, 1 di Pasaman Barat, 2 di Pesisir Selatan, dan 1 di Tanah Datar,” katanya menutup.

Dari Halaman. 1

pendekatan atau mendaftarkan diri ke partai politik. “Sementara dua ASN lagi menghadiri silaturahmi dengan bakal calon yang dapat mengunggulkan bakal calon tersebut,” sebut Surya lagi.

Setelah ditindaklanjuti oleh Bawaslu, katanya lagi, 17 kasus di antaranya sudah diberikan sanksi sesuai rekomendasi dari Komisi ASN (KASN). Sanksi yang diberikan, berupa sanksi moral kepada satu orang ASN, sementara 16 lainnya diberikan sanksi disiplin kategori sedang.

“Sampai 10 Agustus, ditemukan 20 pelanggaran. Satu di tingkat provinsi, dua di Kabupaten Pasaman, 2 di Kota Solok, 3 di Sijunjung, dan 4 di Padang Pariaman. Lalu ada 2 kasus di Kabupaten Solok, 1 di Agam, 1 di Limapuluh Kota, 1 di Pasaman Barat, 2 di Pesisir Selatan, dan 1 di Tanah Datar,” katanya menutup.

Melalui data penanganan pelanggaran, ulas Ratna, pihaknya dapat melakukan langkah-langkah antisipasi. Bawaslu juga bekerja sama dengan sejumlah pihak terkait, yakni Kementerian Dalam Negeri, Komisi ASN (KASN), kepolisian, hingga kejaksaan.

“Berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan anggaran program kegiatan yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan kontestasi yang bisa juga menjadi salah satu sumber dana kampanye pada pelaksanaan Pilkada 2020 kami bekerjasama dengan KPK dan juga dengan PPAATK,” kata Ratna.

Agam dan Sijunjung Rawan Menanggapi masuknya Agam dalam prediksi 10 daerah paling rawan pelanggaran netralitas ASN dalam Pilkada, Ketua Bawaslu Kabupaten Agam Elvys mengatakan bahwa secara indeks nasional, memang daerah tersebut menempati peringkat kesepuluh pada tabel. Salah satu indikator yang menyebabkan hal itu, adalah kenetralitas ASN saat Pemilu.

Agam dan Sijunjung Rawan Menanggapi masuknya Agam dalam prediksi 10 daerah paling rawan pelanggaran netralitas ASN dalam Pilkada, Ketua Bawaslu Kabupaten Agam Elvys mengatakan bahwa secara indeks nasional, memang daerah tersebut menempati peringkat kesepuluh pada tabel. Salah satu indikator yang menyebabkan hal itu, adalah kenetralitas ASN saat Pemilu.

“Tentu itu menjadi *early warning* (peringatan dini.red) bagi kami. Langkah-langkah yang telah kami lakukan adalah menguatkan koordinasi dengan seluruh pihak yang berkaitan dengan netralitas ASN itu seperti, Pemda dan dinas-dinas,” kata Elvys kepada *Haluan*, Kamis (13/8).

Selain itu, pihaknya juga terus melakukan sosialisasi kepada ASN. Meski sebelumnya, sosialisasi sempat terhenti karena ditundanya tahapan Pilkada serentak akibat Covid-19, dan baru akan dilanjutkan kembali.

“Panwaslu di kecamatan juga kami tugaskan untuk menyurati pemerintahan yang ada di kecamatan. Kami terus melakukan upaya sosialisasi, agar kenetralitas ASN dapat terjaga pada Pilkada Serentak yang akan datang,” sebutnya lagi.

Selama tahapan Pilkada Serentak 2020, Elvys menambahkan, Bawaslu Kabupaten Agam telah memproses satu dugaan pelanggaran netralitas ASN yang telah diteruskan ke KASN. “KASN sudah mengeluarkan rekomendasi ke Pemda dan telah dilakukan pemberian sanksi terhadap ASN bersangkutan, sesuai rekomendasi KASN,” kata Elvys lagi.

“Panwaslu di kecamatan juga kami tugaskan untuk menyurati pemerintahan yang ada di kecamatan. Kami terus melakukan upaya sosialisasi, agar kenetralitas ASN dapat terjaga pada Pilkada Serentak yang akan datang,” sebutnya lagi.

Selama tahapan Pilkada Serentak 2020, Elvys menambahkan, Bawaslu Kabupaten Agam telah memproses satu dugaan pelanggaran netralitas ASN yang telah diteruskan ke KASN. “KASN sudah mengeluarkan rekomendasi ke Pemda dan telah dilakukan pemberian sanksi terhadap ASN bersangkutan, sesuai rekomendasi KASN,” kata Elvys lagi.

Indikator seorang ASN yang diduga tidak netral, kata Elvys, sesuai dengan yang tercantum pada Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016. Selain itu juga ada di UU ASN, PP Nomor 53 tahun 2010, serta PP Nomor 42 Tahun 2004.

“Indikatornya yang terdapat

Indikator seorang ASN yang diduga tidak netral, kata Elvys, sesuai dengan yang tercantum pada Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016. Selain itu juga ada di UU ASN, PP Nomor 53 tahun 2010, serta PP Nomor 42 Tahun 2004.

“Indikatornya yang terdapat

Indikator seorang ASN yang diduga tidak netral, kata Elvys, sesuai dengan yang tercantum pada Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016. Selain itu juga ada di UU ASN, PP Nomor 53 tahun 2010, serta PP Nomor 42 Tahun 2004.

“Indikatornya yang terdapat